

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR di DESA PEMATANG PANJANG
KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN
BATU BARA**

SKRIPSI

OLEH :

ROWLANDO HOUTSMA SIBORO

NPM : 188510061



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)8/9/22

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PEMATANG PANJANG
KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN
BATU BARA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Gelar Sarjana Di
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

OLEH:

**ROWLANDO HOUTSMA SIBORO
NPM : 188510061**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

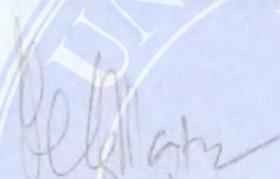
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur
di Desa Pematang Panjnag Kecamatan Air Putih
Kabupaten Batu Bara

Nama Mahasiswa : Rowlando Houtsma Siboro

N P M : 18.851.0061

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP.
Pembimbing I


Marlana Deliana, S.AB, M.AB.
Pembimbing II

Mengetahui:


Dr. Effiaty Juliana Hasibuan, M.Si.
Dekan


Dr. Novita wulandari, S.ST, M.Si
Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Tanggal Lulus : 09 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 09 Agustus 2022



Rowlando Houtsma Siboro

188.851.0061

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rowlando Houtsma Siboro
Npm : 188510061
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 01 September 2022
Yang Menyataka

Rowlando Houtsma Siboro
188510061



ABSTRAK

PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR di DESA PEMATANG PANJANG KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA

Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peranan Kepala desa sebagai pemimpin desa. Adapun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa pematang panjang adalah pembangunan infrastruktur keras (*physical hard infrastructure*) yaitu pembangunan jalan dan pembangunan ini sudah berlangsung dilaksanakan. Pembangunan ini dilakukan dikarenakan dapat dilihat bahwa infrastruktur jalan di desa Pematang panjang belum memadai sebahagian jalan yang masih rusak salah satunya akses jalan yang rusak terletak di jalan Makmur II hingga kampung Kristen dan Tomuan sejauh 2 KM dan membuat masyarakat sulit beraktivitas akan tetapi anggaran biaya pemerintah desa kurang dalam mewujudkan keinginan masyarakat maka sebab itu pemerintah desa memutuskan pembangunan yang didahulukan adalah rabat beton di persawahan karena mata pencarian masyarakat desa pematang panjang yang lebih menonjol adalah bertani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Soekanto Sulistyowati (2017:211) terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan terdiri dari informan utama, informan kunci dan informan tambahan. Hasil penelitian menunjukkan peranan dalam pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan lancar dan baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan dengan usaha usaha yang dilakukan.

Kata Kunci : Peranan, Pembangunan, Infrastruktur

ABSTRAK

the role of the village head in the infrastructure development of Pematang Panjang village, Air Putih sub-district, Batubara district

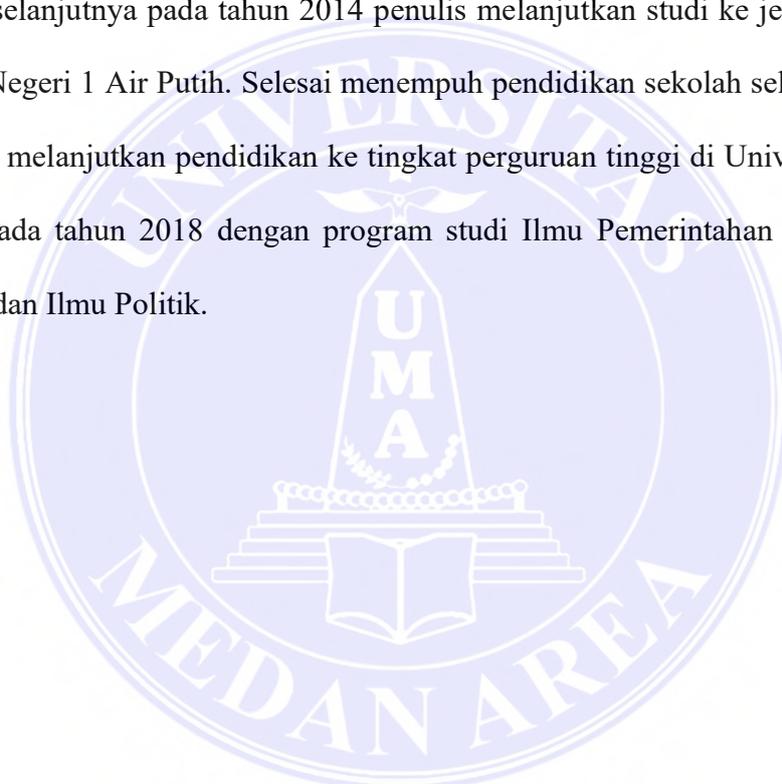
The success of the development The success of developing a village cannot be separated from the role of the village head as a village leader. The development carried out by the Pematang Panjang Village government is the construction of physical hard infrastructure, namely road construction and this development is currently underway. This development was carried out because the road infrastructure in Pematang Panjang Village was inadequate, some of the roads were still damaged, one of which was the damaged access road located on Jalan Makmur II to the Christian and Tomuan villages as far as 2 KM and made it difficult for people to move. However, the village government's budget is lacking in realizing the wishes of the community, therefore the village government has decided that the priority for development is concrete rebates in the rice fields because the livelihoods of the people of Pematang Panjang Village are more prominent as farmers. This study aims to determine the role of the village head in the implementation of infrastructure development in Pematang Panjang Village, Air Putih District, Batubara Regency. The theory used in this research is Soekanto Sulistyowati (2017:211) consisting of planning, implementation and supervision. This study used a qualitative descriptive method and consisted of main informants, key informants and additional informants. The results of the study indicate that the role in infrastructure development has been running smoothly and well in planning, implementing and monitoring and with the efforts made.

Keywords : *Role, Development, Infrastructure*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rowlando Houtsma Siboro lahir di Medan pada tanggal 25 Juni 2000, anak dari Robert Houtsma Siboro, S.Th dan Yosephine Manurung. Penulis merupakan anak 1 (pertama) dari 4 (empat) bersaudara.

Penulis memulai pendidikan Sekolah dasar Negeri 016510 pada tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2011 penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Air Putih, selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan studi ke jenjang SMA di SMA Negeri 1 Air Putih. Selesai menempuh pendidikan sekolah selama 12 tahun, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Universitas Medan Area pada tahun 2018 dengan program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Allah yang mengasihiku oleh berkat dan kemurahan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang telah memberikan limpahan Kasih dan berkat-Nya serta menuntun penulis dalam mengerjakan skripsi “**Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara**”.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk memenuhi suatu syarat dalam menyelesaikan Program Studi S1 (Strata Satu) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil mmaupun moril, maka untuk itu penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Novita wulandari, S.ST, M.Si selaku ketua program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP Dosen Pembimbing I (pertama) yang memberikan bimbingan maupun saran kepada penulis.
5. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB Dosen Pembimbing II (kedua) yang memberikan saran dalam penyusunan skripsi penulis.

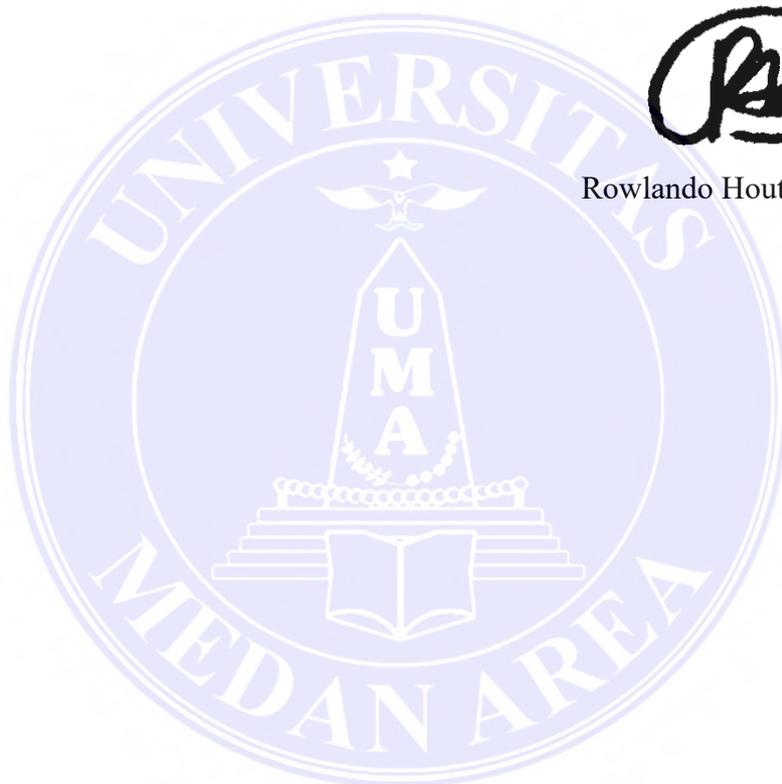
6. Ibu Fitri Suciati Lubis, S.Sos, M.SP selaku sekretaris, yang telah memberikan arahan pada penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu dosen beserta staff pegawai dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak ilmu, maupun informasi selama perkuliahan.
8. Kepada Bapak Parulian Gultom selaku Kepala desa Pematang panjang, Bapak Gompel Hutabarat selaku BPD desa Pematang panjang, Ibu Rany Hertaty selaku perangkat desa Pematang panjang, Bapak Michael Manurung selaku masyarakat desa masyarakat Pematang panjang, Bapak Erwin Panjaitan selaku masyarakat desa Pematang panjang yang telah banyak membantu serta memberikan informasi selam pelaksanaan penelitian yang dilakukan.
9. Kepada kedua orang tua Bapak Robert Houtsma Siboro dan Ibu Yosephine Manurung yang telah banyak berjuang kepada penulis dalam memberikan semangat, nasehat, material dan Doa dalam menyelesaikan studi penulis dan juga kepada adik-adik saya Yohana, Anjel, dan Valen.
10. Kepada Yoan Olivia Sirait, S.Mat yang telah sabar dalam mengajari penulis dan membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
11. Seluruh teman-teman stambuk 2018 prodi Ilmu Pemerintahan sebagai teman berjuang dari awal perkuliahan hingga saat ini.
12. Kepada kakak Try Mayasari sebagai Kakak senior di kelas Ilmu Pemerintahan yang telah banyak mengajari cara penyusunan skripsi ini.

Penulis meyakini sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, 09 Agustus 2022



Rowlando Houtsma Siboro



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Peranan	8
2.1.1 Pengertian Peranan	8
2.2 Pengertian Kepala Desa	10
2.2.1 Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan Desa	10
2.3 Pengertian Desa	12
2.4 Pembangunan Desa	13
2.4.1 Ciri-Ciri Pembangunan	18
2.4.2 Tujuan Pembangunan	20
2.5 Pembangunan Infrastruktur Keras	23
2.6 Studi Relevan	24
2.7 Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	29
3.1.2 Jenis Penelitian	29

3.1.3	Sifat Penelitian	29
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.3	Informan Penelitian.....	32
3.4	Teknik Pengumpulan Data	32
3.5	Teknik Analisis Data	33
BAB IV	35
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian	35
4.1.1	Gambaran Umum Desa Pematang Panjang	35
4.1.2	Sarana dan Prasarana.....	38
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa.....	41
4.2	Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur	44
4.2.1	Perencanaan	46
4.2.2	Pelaksanaan.....	51
4.2.3	Pemantauan dan Pengawasan	58
4.3	Faktor Penghambat.....	60
BAB V	63
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kantor Desa Pematang Panjang.....	34
Gambar 4. 2 Pelaksanaan Pembangunan.....	50
Gambar 4. 3 Partisipasi Masyarakat.....	55



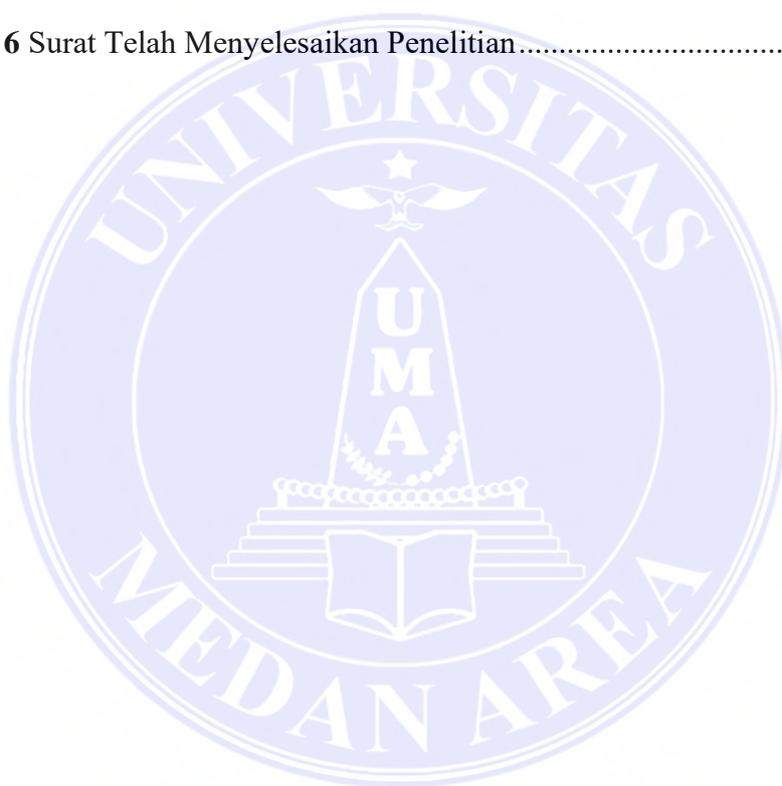
DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jarak Desa ke Ibukota	35
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Pematang Panjang.....	36
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	37
Tabel 4. 4 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	37
Tabel 4. 5 Sarana Kesehatan	38
Tabel 4. 6 Sarana Ibadah	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lamp. 1 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Parulian Gultom selaku Kepala Desa dan Bapak Gompel Hutabarat selaku BPD	66
Lamp. 2 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Rany Hertaty Selaku Perangkat Desa.....	67
Lamp. 4 Dokumentasi Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Desa	68
Lamp. 3 Daftar pertanyaan wawancara.....	69
Lamp. 5 Surat Izin Penelitian dari Fakultas	70
Lamp. 6 Surat Telah Menyelesaikan Penelitian.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan di dalam proses pertumbuhan ekonomi karena dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, sehingga menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi dan dapat memperlancar pergerakan barang dan jasa.

Dibentuknya suatu Desa juga diatur lebih dalam lagi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 4. Salah satu isi dari pasal tersebut menyatakan bahwa: Untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa haruslah dibuat suatu pembangunan nasional. Adapun hal yang meliputi UU tersebut meliputi bidang pembangunan Desa. Dengan tujuan pembangunan Desa sesuai Pasal 78 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan Desa ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan penanggulangan akan kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana maupun prasarana Desa.

Menurut (Bachtiar Effendi, 2002:48) pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang penting pada suatu Desa. Dimana, pembangunan yang dimaksudkan ialah adanya fasilitas dari pelayanan publik seperti: jalan, listrik, air bersih jembatan, ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, transportasi, dengan tujuan supaya masyarakat lebih mudah dalam melakukan

kegiatan yang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap pembangunan, maka dibutuhkan dengan adanya tenaga/unsur penggerak yang dapat menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat merealisasikan dalam pembangunan dan dalam hubungan ini maka kepala Desa sebagai penguasa tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, ia harus mampu mengerjakan tugasnya yang telah diberikan kepadanya.

Pembangunan bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata serta membuat perubahan dan kemajuan kearah yang lebih baik, dalam pelaksanaannya pembangunan Desa senantiasa memperhatikan asas pembangunan yaitu, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang besar bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Tujuan Pembangunan Desa yang dilaksanakan terdapat pada Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengemukakan bahwa tujuan dari Pembangunan Desa ialah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesentosaan untuk masyarakat dan kualitas hidup bagi masyarakat, dan juga mengatasi kemiskinan dengan tersalurkan nya kebutuhan dasar, pembangunan sarana maupun prasarana Desa, mengembangkan kemampuan ekonomi lokal, dan pemanfaatan SDA dan SDM secara berkelanjutan. Adapun tahap untuk Pembangunan Desa adalah menyusun rencana, mewujudkan rencana, dan melakukan pengawasan. Pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pembangunan nasional. Dimana, pembangunan nasional adalah setiap tahap saat proses pembangunan harus melalui kebijakan tertentu dan pembangunannya pun harus merata untuk seluruh wilayah

dan dilakukan bagi kebutuhan ataupun kepentingan masyarakat agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan dampaknya dari perbaikan peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah Desa menyusun Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa yang melibatkan masyarakat Desa untuk bergotong royong guna membantu dalam pembangunan Desa dan masyarakat Desa boleh melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Dalam menjalankan tugas pembangunan Desa, kepala Desa mempunyai kedudukan selaku pemimpin Desa yang bertanggung jawab atas tercapainya pembangunan Desa dimana peranannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peranan dari kepala Desa adalah hal yang sangat amat penting, sebab posisinya sebagai pejabat pemegang kekuasaan tertinggi di Desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam Desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya dan turut bekerjasama dalam pembangunan itu sendiri.

Dana Desa salah satunya diperuntukkan pada kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Instrumen terpenting dalam pembangunan yang harus disediakan ialah infrastruktur karena infrastruktur ialah kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan hasil pra penelitian adapun masalah yang dihadapi dalam pembangunan tersebut adalah capaian kinerja pembangunan infrastruktur masih belum maksimal. Ssalah satunya dapat dilihat dari kondisi umum infrastruktur yang masih kurang memadai, khususnya pada infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian.

Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa Pematang panjang yang berada di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu bara merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana desa dimulai pada tahun 2021 dengan jumlah Rp. 1.366.015.425 dan dalam bidang pelaksanaan pembangunan dana desa dibagi sebesar Rp. 231.674.785,- dan setelah dana desa dicairkan maka pemerintah desa pematang panjang memberlangsungkan pembangunan yang telah direncanakan. Adapun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa pematang panjang adalah pembangunan infrastruktur keras (*physical hard infrastructure*) yaitu pembangunan jalan karena pemerintah desa melakukan pembangunan secara bertahap dan pembangunan dilakukan dimana yang terpenting untuk didahulukan. Pemerintah Desa Pematang panjang dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Desa, agar dapat berupaya untuk mengoptimalkan pembangunannya, Adapun program yang menjadi perhatian lebih bagi pemerintah Desa Pematang panjang ialah perbaikan jalan sebagai sarana

transportasi utama masyarakat karena dengan terpenuhinya keperluan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.

Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara terdapat suatu masalah yang berkaitan dengan infrastruktur yang ada di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. Salah satunya ialah infrastruktur jalan yang rusak. Tepatnya akses jalan yang rusak terletak di jalan Makmur II hingga kampung Kristen dan Tomuan sejauh 2 KM. Hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti Peran pada Kepala Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara pada jalan Makmur II hingga kampung Kristen dan Tomuan sejauh 2 KM. Selanjutnya sebagai bentuk dari keinginan yang kuat untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, dan diharapkan Kepala Desa menjadi penggerak ditengah-tengah masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan menuju kearah yang lebih baik bagi masyarkatnya. Dengan demikian peranan dari seorang Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan tidak menutup kemungkinan akan berjalan baik karena adanya kerja sama antara Kepala Desa dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dan pengamatan peneliti secara langsung kinerja pembangunan Desa belum mencapai kemaksimalan yang dapat dilihat dari infrastruktur jalannya yang terdapat kerusakan dan masih sulit untuk dilalui dan setelah dana desa dicairkan maka pemerintah desa langsung melaksanakan proses kegiatan pembangunan infrastruktur keras di desa pematang panjang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahannya. Maka, rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peranan kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara?
2. Apakah yang menjadi hambatan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui peranan dari kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Adapun manfaat secara teoritis ialah memperluas pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai peran dari kepala Desa dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

2. Manfaat praktis ialah sebagai evaluasi kepada instansi yang terkait pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peranan

2.1.1 Pengertian Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara sosiologis peranan ialah aspek dinamis yang merupakan suatu tindakan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan menjalankan hak-hak kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya.

Menurut Thoha (2012:10). Peranan ialah suatu rangkaian kepribadian yang teratur, yang mengemuka karena oleh suatu jabatan yang tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. perilaku seseorang barangkali juga dapat mempengaruhi bagaimana peranan harus dilaksanakan. Peranan muncul karena seseorang memahami bahwa ia tidak bekerja dengan sendirian. Mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan memiliki lingkungan yang berbeda. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah.

Menurut David Berry (2003:105), mengartikan bahwa peranan ialah sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang mempunyai sebuah kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh sebab itu dapat disebutkan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma- norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua keinginan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat

atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa peran adalah perilaku atau sikap yang ditunjukkan terhadap seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Menurut Veitzal Rivai (2004: 148) Peranan diartikan sebagai perilaku atau sikap yang diatur dan harapannya seseorang dalam posisi tertentu. Menurut Riyadi (2002:138) Peran dapat dikatakan sebagai orientasi dan rencana dari bagian yang dipertunjukkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, penyelenggara baik itu individu maupun organisasi akan berkarakter sesuai harapan orang atau daerahnya sendiri. Peran juga diartikan sebagai ketentuan yang diberikan secara structural (Norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menyatukan pembimbing dan menjalankan fungsinya dalam mengorganisasi

Menurut (Soekanto, Soejono, Sulistyowati, & Budi, 2017, p. 211) perihal peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat yang penting sebagai berikut:

- a. Peranan tertentu harus dikerjakan jika tatanan masyarakat hendak dipertahankan kelanjutannya
- b. Peran dikatakan sebagai perilaku yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.
- c. Peran disebut seperti perilaku yang diperlukan sebagai struktur sosial masyarakat.

- d. Dalam masyarakat kadang kala ada individu-individu yang tidak melaksanakan peranannya, peranan yang diperlukan oleh masyarakat atas pelaksanaanya membutuhkan ketaatan.
- e. Jikalau semua orang berupaya dan sanggup untuk menjalankan perannya. Belum tentu masyarakat akan dapat memberikan harapan yang seimbang. Sering
- f. terlihat masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

2.2 Pengertian Kepala Desa

Pengertian kepala Desa tercatat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 ayat 3 yakni pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut sebagai penguasa tertinggi dan yang dibantu perangkat Desa untuk penyelenggaraan pemerintah Desa

Kepala Desa adalah kepala wadah pemerintahan Desa yang berkedudukan strategis dan memiliki kewajiban atau tanggungan yang luas. Tanggung jawab melingkupi kegiatan pekerjaan yang tersendiri dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berlandaskan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di Desa tanggung jawab urusan tugas tertuju pada kepala Desa. Tanggung jawab urusan pekerjaan itu dapat dilakukan sendiri oleh kepala Desa atau melalui orang lain.

2.2.1 Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan Desa

Fungsi kepala Desa adalah untuk mewujudkan dan melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana peDesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Kepala Desa pun bertugas sebagai sosial ekonomi, lingkungan hidup.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang tercantum pada Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1: mengenai tentang Kepala Desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan Desa, mengupayakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan memperdayakan masyarakat Desa. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berhak:

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;

1. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
2. Memegang kekuasaan pengelolaan atau pengendalian keuangan dan asset Desa
3. Menetapkan peraturan Desa
4. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
5. Membina kehidupan masyarakat Desa

Talizudhu Ndraha (2005:5) Menjelaskan bahwa kepala Desa selaku pelaksana pembangunan adalah

1. Sanggup mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan keperluan Desa. Perencanaan yang baik adalah bilamana kepala Desa dalam membentuk suatu perencanaan dan mempunyai tujuan apa yang ingin diraih dari pembangunan yang akan dilakukan tersebut, lalu menentukan tahapan - tahapan yang harus dilaksanakan. Selanjutnya kepala Desa sekiranya dengan cepat menangkap aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok masyarakat dalam menjalankan perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan benar - benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Desa.

2. Fungsi kepala Desa melaksanakan pembangunan juga mesti sanggup memberikan petunjuk kepada bawahan guna melaksanakan pembangunan dan bekerjasama dalam usaha pencapaian tujuan dalam pembangunan peDesaan dan kepala Desa mampu mengambil keputusan. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi atau tugas dari kepala Desa telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yang dimana kepala Desa patut mengetahui, mengupayakan pembangunan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan mempunyai tujuan yang lebih baik dalam mengerjakan pembangunan.

2.3 Pengertian Desa

Desa merupakan dasar dari perangkat pemerintah yang terkecil dari suatu persatuan pemerintahan Negara. Kemudian dapat dikatakan bahwa kesuksesan dalam mewujudkan kesejahteraan juga terlihat dari sejauh mana keikutsertaan masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang dikatakan dengan kata lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai penentu atau batas wilayah yang berwenang untuk mengontrol dan mencampuri kepentingan masyarakat setempat, berlandaskan silsilah dan adat-istiadat setempat yang diterima dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Haw. Widjaja (2003:3), Desa mempunyai integritas masyarakat hukum yang memiliki rangkaian asli berlandaskan hak asal usul yang bersifat signifikan. Selanjutnya menurut Ahmadi (2003:41) Desa merupakan kesatuan

hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat di definisikan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai tatanan asli berdasarkan kedaulatan yang bersifat istimewa. Sedangkan menurut Bintaro dalam Yansen (2013:195) Desa adalah penjelmaan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya sebagai timbal balik dengan wilayah lain.

2.4 Pembangunan Desa

Pembangunan menurut beberapa ahli yaitu pembangunan menurut Rogers (Rochjata, dkk: 2011:3) adalah perubahan yang bermanfaat dan mengarah pada sistem social dan ekonomi yang ditetapkan sebagai harapan suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan adalah proses yang berjalan dalam sebuah garis lurus, yaitu dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Siagian (2005: 108), menguraikan bahwa pembangunan Desa ialah keseluruhan prosedur rangkaian usaha-usaha yang dilaksanakan dalam kawasan wilayahnya dengan tujuan untuk mengembangkan taraf hidup masyarakat Desa dengan memperluas kesejahteraan dalam Desa. Pembangunan Desa dengan beragam masalahnya merupakan pembangunan yang berjalan menyentuh kepentingan keperluan bersama.

Pembangunan dapat disebut suatu rancangan perubahan sosial yang berjalan secara terus-menerus mengarah dalam perkembangan, kemajuan dan membutuhkan saran yang menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara (Haryono Sudiramunawar, 2002: 5).

Disini dapat diartikan bahwa pembangunan adalah salah satu upaya dalam melakukan suatu perubahan sosial yang berlanjut secara terus-menerus mengarah kearah perkembangan yang baik, dan bertujuan untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik sebelumnya. Pembangunan infrastruktur Desa ini merupakan salah satu pusat kepedulian pemerintah sebab Desa adalah bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Dengan membangun Desa berarti telah membangun Negara Republik Indonesia yang tercinta artinya pembangunan Desa dapat langsung dinikmati oleh penduduk masyarakat yang ada di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu-bara.

Pada hakekatnya pembangunan Desa dilaksanakan oleh masyarakat secara bergotong royong bersama dengan pemerintah terutama dalam memberikan panduan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya

Pembangunan Desa ialah bagian dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Desa ini mempunyai arti penting dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kebijakan Pembangunan perdesaan tahun 2010-2014 pemerintah memberkan pengarahan agar meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perDesaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperluas akses masyarakat atas sumber daya produktif untuk mengembangkan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi,

permodalan, informasi, teknologi dan inovasi, beserta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar.

2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perDesaan melalui peningkatan kualitasnya, dan konsolidasi kelembagaan beserta modal sosial masyarakat perDesaan berupa jaringan kerjasama.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat peDesaan dengan memenuhi hak-hak dasar.
4. Terciptanya lapangan kerja yang berkualitas dipeDesaan, khususnya lapangan kerja non pemerintah.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan dalam jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang bisa mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), inteligensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan misi pembangunan Desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang digunakan sebagai Sistem Pembangunan Desa.

Pembangunan Desa dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini :

1. Sebagai suatu proses adalah mengawasi jalannya proses perubahan yang berlangsung dengan cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan Desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, dan juga dari segi

psikologis. Hal ini akan dilihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.

2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengupayakan agar rakyat memiliki usaha maupun kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan Desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan Desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Sebagai suatu program adalah berusaha memajukan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujukan kepada kegiatantan bidang-bidang yang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
4. Sebagai suatu gerakan karena pada umumnya semua gerakan atau upaya kegiatan pembangunan ditujukan ke Desa-Desa. Sebagai bentuk gerakan dimana pembangunan Desa mengupayakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan Desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat

departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu pelaksanaannya perlu adanya koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta Desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar semua program kegiatan tersebut bisa saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan Desa terdiri dari perencanaan pembangunan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, serta pengawasan serta pemantauan pembangunan Desa,.

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan Desa diawali dengan tahap perencanaan pembangunan Desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, yaitu tentang Pedoman Pembangunan Desa, dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawartan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Pemikiran supeno ini sejalan dengan pendapat Robinson Tarigan (2009) yang menyebutkan ada empat elemen dasar perencanaan yaitu:

- a. Perencanaan berarti memilih
- b. Perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumber daya,
- c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan,

- d. Perencanaan berorientasi masa depan
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan jalannya kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan dan penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Oleh sebab itu bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang sanggup menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya

3. Pengawasan Pembangunan Desa

Untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

2.4.1 Ciri-Ciri Pembangunan

Pada dasarnya, ciri-ciri pembangunan itu dapat ditinjau dari pengertian pembangunan itu sendiri. Ciri-ciri pembangunan yang diterangkan disini adalah berlandaskan tujuh ide pokok yang muncul dari defenisi pembangunan yang diberikan oleh Sondang P. Siagian(2014), yaitu:

1. Pembangunan adalah suatu proses. yakni pembangunan merupakan susunan kegiatan yang berjalan secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap- tahap dalam satu pihak independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Beraneka ragam upaya yang dapat dipakai untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
3. Pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Seperti dimaklumi, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal untuk dilaksanakan pada jangka waktu tertentu di masa depan
4. Rencana pembangunan memuat makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai pengembangan kemampuan suatu negara bangsa untuk bertumbuh dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu tertentu ke jangka waktu yang lain,

terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan status quo yang ada.

5. Pembangunan menuju pada modernitas. Modernitas di sini dijelaskan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
6. Modernitas yang ingin diraih melalui beragam kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut meliputi seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan
7. Segala sesuatu yang telah dibahas di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa, sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh fondasinya dan bertambah mantap keberadaannya.

2.4.2 Tujuan Pembangunan

Dalam melaksanakan pembangunan secara nasional ini, pemerintah Indonesia tidak pernah terlepas dari tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional segala wilayah Indonesia. Adapun tujuan pembangunan nasional di Indonesia secara umum seperti:

1. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik.

Mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik ialah salah satu misi umum dalam pembangunan nasional. Dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang baik, dibutuhkan tubuh-tubuh yang kuat akan jiwa

pemerintahan dapat menjadi sehat untuk melaksanakan kewajiban dan fungsinya demi mengembangkan bangsa. Perwujudan sistem pemerintahan yang baik harus diberlakukan terlebih dahulu melalui sistem pemerintahan terkecil yang berlaku di masyarakat. penting adanya peneguhan terhadap struktur pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi terhadap tugas dan fungsi yang dijalankannya dalam rangka untuk melengkapi keperluan masyarakatnya. Demi mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, pemerintah memutuskan suatu kebijakan yaitu diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sebagai salah satu alat pemerintah pusat untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam pembangunan.

2. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan di Berbagai Sektor.

Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat banyak, namun belum tentu memastikan kesejahteraan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia semakin gigih melaksanakan pembangunan di berbagai daerah untuk memenuhi keperluan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa dalam berbagai aspek dan bidang. Seperti melakukan percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya terpusat di kota saja, melainkan sudah menjangkau pembangunan di wilayah pedesaan.

3. Membangun Kesejahteraan Rakyat

Salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia yang butuh

diamati salah satunya dengan melaksanakan pembangunan terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lain sebagainya.

4. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945.

Kebijakan Pembangunan perDesaan tahun 2014 diarahkan untuk memajukan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat perDesaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengembangkan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi, serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar.
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perDesaan melalui peningkatan kualitasnya, dan penguatan kelembagaan serta modal sosial masyarakat perDesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat peDesaan dengan memenuhi hak-hak dasar.
4. Meciptakan lapangan kerja berkualitas dipeDesaan, terkhususnya lapangan kerja non pemerintah.

Pada hakekatnya pembangunan Desa dilaksanakan oleh masyarakat bersama-sama dengan bergotong royong dengan pemerintah terutama dalam memberikan

petunjuk, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat mengembangkan kemampuan masyarakat dalam upaya menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

2.5 Pembangunan Infrastruktur Keras

Menurut (Kodoatie, 2005) ketersediaan infrastruktur dapat memberikan dampak bagi sistem sosial dan sistem ekonomi yang berada di masyarakat.

Secara spesifik oleh Stone (dalam Kodoatie,2003), Infrastruktur diartikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau diperlukan oleh publik sebagai fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

- a. Kategori Infrastruktur Menurut Grigg, ada 6 kategori besar infrastruktur
 1. Kelompok jalan (jalan, jalan raya dan jembatan)
 2. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan dan Bandar udara.
 3. Kelompok air (air bersih, air kotor dan semua sistem perairan termasuk irigasi)
 4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat).
 5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar
 6. Kelompok reduksi dan dsitribusi listrik (listrik dan gas)
- b. Jenis-jenis Infrastruktur
 1. Infrastruktur keras (physical hard infrastructure)

Meliputi jalan raya dan kereta api, bandara, dermaga, pelabuhan dan saluran irigasi.

2. Infrastruktur Infrastruktur keras non-fisik (non-physical hard infrastructure)

Berkaitan dengan fungsi fasilitas umum seperti ketersediaan air bersih, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi.

3. Infrastruktur Lunak

Meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan menjadi peraturan hukum dan perundang undangan).

2.6 Studi Relevan

Judul yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Namun, terdapat kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ulina tahun 2015 dengan judul “Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi kepala desa dalam meningkatkan kinerja pada kantor desa namo bintang kecamatan pancur batu kabupaten deli serdang. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari kepala desa dan perangkat desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Deva Diana Nauseny Tahun 2021 dengan judul “Kinerja Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Di Desa Tanusan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kinerja Kepala Desa untuk meningkatkan atau memajukan pembangunan masyarakat yang ada di Desa Tanusan Kabupaten Kaimana. Dan hasil dari penelitian ini Kinerja kepala Desa masih dikatakan kurang dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan atau meningkatkan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan jalan yang kurang bagus sehingga membuat masyarakat resah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Welson Rompas Tahun 2019 dengan judul “Upaya Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah Desa dalam mengembangkan ataupun meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa nya. Dan hasil dari penelitian ini adalah Upaya pemerintah Upa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa sudah dilakukan dengan baik karena dimana masyarakat sudah diberi banyak arahan dan motivasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat oleh kepala Desa upa terhadap masyarakat yakni berupa motivasi pemberian semangat pembangunan lebih lagi secara terbuka dan transparan mengenai program-program dalam pembangunan Desa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Urbanus Hendri Tahun 2019 dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan Desa Amboyo. Dan hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan strategi bartering yakni dalam penyerahan tugas dan sistem perundingan peran yang dijalankan oleh Kepala Desa adalah mengkoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Agnesya Weenas tahun 2015 dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minut” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa karegesan kecamatan kauditan kabupaten minut dan hasil dari penelitian ini adalah dalam motivasi dapat disimpulkan kepala desa dalam hal ini sudah melakukan dengan baik, baik motivasi kepada perangkat desa maupu pada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam pembangunan.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah suatu konsep untuk melakukan penelitian untuk menjelaskan bagaimana peneliti dalam melaksanakan penelitian dimulai dari awal proses pelaksanaan hingga akhir. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka konsep yaitu berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dan berkesinambungan.

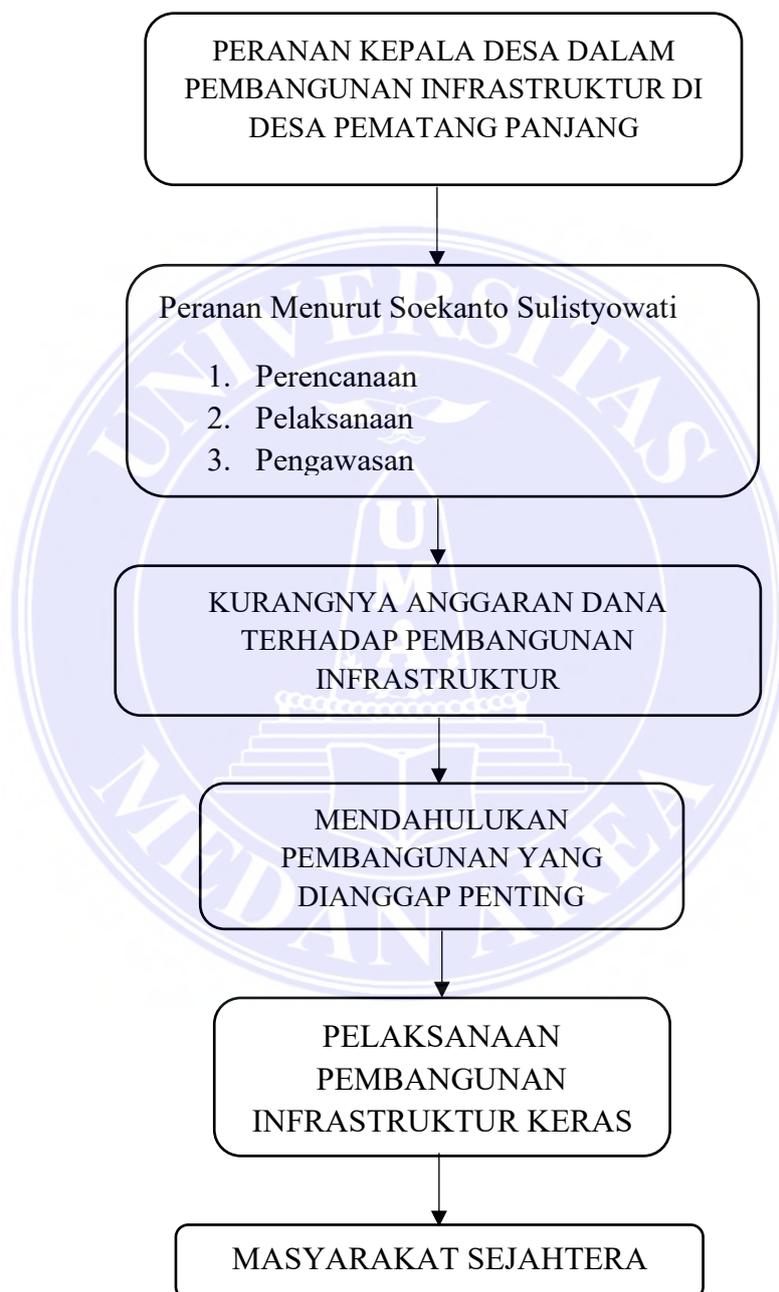
Kerangka pemikiran dianggap relevan dalam upaya menjawab masalah-masalah yang dirumuskan masalah penulis.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai peranan Kepala Desa dalam pembangunan infrasruktur Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. dikarenakan dapat dilihat bahwa infrastruktur jalan di desa Pematang panjang belum memadai sebahagian jalan yang masih rusak salah satunya akses jalan yang rusak terletak di jalan Makmur II hingga kampung Kristen dan Tomuan sejauh 2 KM. Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang ini adalah sangat penting dan meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sekaligus merupakan proses pengembangan pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara. Pencapaian dari penelitian ini menunjukkan peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan yang sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dapat dilihat pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan.

Dalam menjawab rumusan masalah penulis mengambil teori peranan dari (Soekanto, Sulistyowati (2017:211) menjelaskan peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi dan peranan juga dapat sebagai perilaku individu yang penting bagi struktural sosial masyarakat. Adapun indikator-indikator peranan menurut Soekanto, Sulistyowati diantaranya yaitu:

1. Perencanaan merupakan proses menentukan tindakan masa depan secara tepat melalui urutan pilihan dengann memperhitungkan sumber daya yang telah tersedia untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Pelaksanaan merupakan suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan.

3. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan mendukung pencapaian hasil kinerja yang diharapkan sesuai dengan yang sudah direncanakan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan tujuan, yaitu mendalami secara intensif mengenai latarbelakang dari suatu keadaan yang sebenarnya secara langsung dan juga interaksi terhadap lingkungan pada suatu individu, kelompok, dan lembaga maupun masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi alasan penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian jenis kualitatif. Menurut (Kirk dan Miller dalam Moleong, 2000) defenisi dari penelitian kualitatif ialah suatu tradisi pada ilmu pengetahuan sosial secara fundamental yang ketergantungan pada pengamatan manusia di lingkungannya yang memiliki keterkaitan dengan individu tersebut.

Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis akan meneliti langsung ke lapangan dalam mengamati objek yang akan dikaji dan juga berinteraksi secara langsung kepada kepala Desa dengan tujuan agar memperoleh informasi mengenai peran dari kepala Desa sendiri dalam pembangunan infrastruktur Desa. Dimana, penelitian yang akan dilakukan juga akan diperoleh deksriptif yang berupa kalimat tertulis maupun lisan dari sumber dan sikap yang teramati (Bogdam dan Taylor dalam Moleong, 2000).

3.1.3 Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat pada penelitian yang bersifat deskriptif, Menurut Sugiyono (2014:13), Metode deskriptif adalah suatu metode

yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dan untuk memecahkan masalah masalah dalam masyarakat.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat yang dipilih dalam penelitian yaitu di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Alasan penulis memilih tempat ini dikarenakan penulis ingin menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan dengan Program Studi penulis ialah Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area. Mengingat juga di tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis belum ada penelitian yang dilakukan di tempat penelitian tersebut. Alasan lainnya ialah untuk mendapatkan sumber data penelitian juga lebih dimudahkan karena lokasi penelitian berada pada daerah, dimana penulis berdomisili.

No	Kegiatan	Bulan ke :										
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1.	Penyusunan proposal											
2.	Seminar proposal											
3.	Perbaikan proposal											
4.	Pengambilan data/penelitian											
5.	Penyusunan skripsi											
6.	Seminar hasil											
7.	Perbaikan skripsi											
8.	Sidang meja hijau											

Tabel 3.1 Waktu penelitian

3.3 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2010) Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat.

1. Informan Kunci

Informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Desa Pematang Panjang, yaitu Bapak Parulian Gultom.

2. Informan Utama

Informan utama pada penelitian ini adalah perangkat Desa Pematang Panjang, yang berjumlah dua orang yaitu Bapak Gompel Hutabarat selaku BPD dan Bapak Sudarwis selaku sekretaris desa.

3. Informan Tambahan

Informan Tambahan pada penelitian ini adalah Masyarakat Pematang Panjang, yang berjumlah dua orang yaitu Bapak Michael Manurung dan Bapak Erwin Panjaitan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan yang dilaksanakan secara langsung pada objek ataupun tempat yang akan diteliti.

2. Wawancara

Menurut (Singarimbun, 1989: 192) wawancara merupakan suatu proses interaksi maupun komunikasi yang terjadi antara pewawancara dan responden. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil wawancara, yaitu: pewawancara, responden, topik penelitian yang terdapat dalam pertanyaan, maupun kondisi saat wawancara terjadi.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2015:329) dokumentasi merupakan suatu langkah yang dapat dipakai untuk mendapatkan data maupun informasi yang dapat berupa tulisan dalam buku, arsip, maupun dokumen.

4. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan memakai alat indera seperti mata, telinga, ataupun alat indera lainnya saat kejadian berlangsung. Tujuan dari observasi ialah unntuk mengetahui keadaan objek yang diamati. Dimana, kualitas penelitian ditentukan dari kedalaman peneliti memahami keadaan dari objek yang diamati dan mendeskripsikan maupun menggambarannya sealamiah yang pengamat dapat simpulkan (Semiawan, 2010).

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun analisis data pada penelitian ini ialah analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ialah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan suatu data berdasarkan fakta sebenarnya yang diperoleh dari objek yang diamati. Menurut (*Miles dan huberman*, 2014: 17) analisis data kualitatif

dapat dilakukan dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Adapun teknik analisis datanya, yaitu:

1. Mengumpulkan Data: Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, scanning materi, pengetikan data dari lapangan, dan menyusun seluruh data yang diperoleh.
2. Reduksi Data: Bentuk analisis yang mengarahkan, mengelompokkan, menyisihkan data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data-data yang direduksi menunjukkan deskripsi yang lebih cocok menjadi hasil dari pengamatan pada objek penelitian.
3. Menyajikan Data: Analisis data yang dapat berupa gambar, grafik, maupun *chart*. Dengan penyajian itu, maka data tersusun dengan rapi dan akan lebih mudah untuk memahaminya.
4. Menarik Kesimpulan: Kesimpulan yang terdapat pada penelitian kualitatif berupa hasil yang menunjukkan jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dapat diperoleh sebuah kesimpulan pada peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan lancar dan baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan dengan usaha usaha yang dilakukan oleh kepala desa serta perangkat desa dengan mengundang masyarakat setempat untuk melaksanakan rapat mengenai apa saja yang terlebih dahulu di bangun, karena kerja sama yang baik dari semua berbagai bidang untuk bisa menyelesaikan setiap perencanaan pembangunan desa dan tahap pengerjaan sampai selesai sampai sekarang ini yang kita lihat pembangunan desa yang semakin banyak setiap dusun Desa Pematang Panjang yang terselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah setempat.
2. Berdasarkan dari hasil penelitian yang di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dapat diperoleh sebuah kesimpulan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara adalah dana anggaran yang masih kurang Dimana anggaran merupakan faktor yang memiliki peranan cukup penting demi terlaksana suatu pembangunan. Karena tanpa dana maka sangat mustahil pembangunan akan terwujud serta bahan material pembangunan yang semakin mahal dan menyebabkan pembengkakan biaya yang diluar dugaan perhitungan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, peneliti menemukan saran apa saja yang harus diberikan yakni:

1. Diharapkan kepada Kepala desa agar menjadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengawasan pembangunan dan membuat tindakan tegas dalam mengatur masyarakat.
2. Masyarakat harus banyak terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan agar masyarakat juga bisa tau dan melihat seperti apa hasil dari pembangunan tersebut dan agar hasilnya juga sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.
3. Pemerintah desa juga harus bisa memanggil beberapa masyarakat desa dalam proses pelaksana pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Ahmadi. 2003. Psikologi Umum, Jakarta: Rineka Cipta
- Abdul, Halim, 2004. Membangun Desa Partisipasif. Jakarta: PT Bumi Aksyra
- Berry, David. 2003. Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bodgan, B. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Kencana.
- Conny R. Semiawan. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- HAW. Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harun, Rochajat, dan Elvinaro Ardianto. 2011. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Kirk dan Miller dalam Lexy. Moeong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Roskarya.
- Kodoatie, R.J. (2003), Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kodoatie, R. J. (2005). Pengantar manajemen infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meleong, Lexi, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Miftah thoha. 2012. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Miles, M.B, Huberman, A.M & Saldana,. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terhemahan Tjetjep Rohindi Rohidi: UI-Press.
- Ndraha Taliziduhu. 2005. Teori Budaya Organisasi. Cetakan Pertama. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Gramedia, Jakarta.
- Semiawan, C. R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Grasindo.

- Siagian, Sondang. P. 2005. Adminitrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Singarimbun, M dan S. Effendi (Editor). 1989. Metode Penelitian Survy. LP3S: Jakarta.
- Yansen, T. P. 2013. Gerakan Desa Membangun, Sebuah Ide Inovatif tentang Pembangunan Desa. PT. Danar Wijaya, Cetakan Pertama.
- Soekanto, Soejono, Sulistyowati, & Budi. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafinso Persada.
- Sudriamunawar, Haryono. 2002. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Bandar Maju.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta

Jurnal

- Asnuddin, A. 2009. Pembangunan infrastruktur perdesaan dengan pelibatan masyarakat setempat. *Smartek*, 7(4).
- NIM, U. H., & Martoyo, H. 2019. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. *Publika-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(4).
- Pangkey, D. K. 2016. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 161096.
- Suruan, A. L., Rompas, W., & Tulusan, F. 2019. Upaya Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(74).
- Weenas, N. A., Lengkong, D., & Mambo, R. (2015). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Karegesan Kec. Kauditan Kab. Minut (Satu Studi Di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32).

Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan pelaksanaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 ayat 3 tentang pemeritah
Desa adalah kepala Desa disebut sebagai penguasa tertinggi
Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka
menengah daerah provinsi sumatera utara
Peraturan Lembaga (Perlem LKPP) No. 12 Tahun 2019 mengenai tentang kondisi
sosial budaya masyarakat setempat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, yaitu tentang Pedoman
Pembangunan Desa

Skripsi

Diana Nauseny, D. 2021. Kinerja Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan
Di Desa Tanusan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat (Doctoral
dissertation, Universitas Bosowa).
Purba, Sri Ulina. B. (2015). Tugas dan fungsi kepala desa beserta perangkat desa
dalam meningkatkan kinerja pada kantor desa Namo Bintang Kecamatan
Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Parulian Gultom selaku Kepala Desa



Wawancara dengan Bapak Gompel Hutabarat (BPD)



Wawancara dengan Ibu Rany Hertaty selaku perangkat desa



Wawancara dengan bapak Erwin Panjaitan selaku masyarakat



Wawancara dengan bapak Michael Manurung selaku masyarakat

Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan untuk informan kunci yaitu kepala desa pematang panjang.

1. Dalam mengenai perencanaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan?
2. Bagaimana cara pemerintah desa dalam melaukan perencanaan pembangunan?
3. Bagaimana cara bapak selaku kepala desa dalam menyampaikan rencana pembangunan?
4. Dalam pelaksanaan pembangunan ini siapa saja yang dipekerjakan?
5. Dalam mengenai pengadaan barang dan jasa bagaimana cara pemerintah desa dalam menanganinya?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembanguna ini?
7. Bagaimana tindakan bapak jika dana anggaran kurang dalam melakukan pembangunan sesuai dengan permintaan masyarakat?

Daftar pertanyaan untuk informan utama yaitu BPD dan Sekretaris desa

1. Dalam pelaksanaan pembangunan siapa saja yang dipekerjakan?
2. Pengawasan seperti apa yg dilakukan oleh pemerintah desa?
3. Bagaimana kinerja kepala desa apakah beliau semangat dan gigih dalam pelaksanaan pembangunan ini?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur?
5. Apa saja pengorbanan kepala desa dalam pembanguna ini?

Daftar pertanyaan untuk informan tambahan yaitu masyarakat desa pematang panjang

1. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap RPJM yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa?
2. Bagaimana cara kepala desa dalam menyampaikan informasi rencana pembangunan yang akan dilakukan?
3. Pengawasan eperti apa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

